

## **Abstract**

One role of civil society in improving the quality of governance in Mataram is an activity to Encourage Openness of Public Information/Keterbukaan Informasi Publik (KIP). The problem this research is how the pattern of the relationship of civil society and local government on the activities of NGO's in pushing KIP in Mataram in Year 2011-2015? The research objective was to determine the pattern of civil society relations and local governments on the activities of NGOs in pushing KIP in Mataram Year 2011-2015. Theoretically, there are four dimensions that affect the relationship of civil society and local government, namely; orientation issues, financial, and organizational policies. The research method uses triangulation is merging qualitative and quantitative research methods to produce a more complete picture of the phenomenon under study. The results showed that the pattern of the relationship of civil society and local government on the activities of NGOs in pushing KIP 2011-2015 year are determined by the strategy undertaken NGO. NGO strategy in cooperation with the local media is very effective in influencing local government. The pattern of the relationship of civil society and local governments also show collaboration between NGOs with local governments. The collaboration one of which is shown through technical assistance undertaken in the preparation of NGO Public Information Service Standards. The collaboration done as NGOs and local governments have the same interests on the issue of disclosure. NGO concerned with the disclosure of information as it relates to the ease of obtaining information about the budget and the issue of corruption. In terms of financing NGO activities in cooperation with international institutions. Suggestions in this research in the future should the future of civil society and community utilizing internal budget as a form of assertion of civil society as an independent organization, voluntary and representative of the interests of the community.

**Keywords:** *NGO, Local Government, Openness of Public Information*

## **ABSTRAK**

Salah satu peran civil society dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Mataram adalah kegiatan mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram Tahun 2011-2015? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP di Kota Mataram Tahun 2011-2015. Secara teoretik ada empat dimensi yang mempengaruhi hubungan civil society dan pemerintah lokal yaitu; orientasi isu, finansial, kebijakan dan organisasional. Metode penelitian menggunakan triangulasi yaitu penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan gambaran lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan civil society dan pemerintah lokal pada kegiatan NGO dalam mendorong KIP Tahun 2011-2015 ditentukan oleh strategi yang dilakukan NGO. Strategi NGO bekerjasama dengan media lokal sangat efektif dalam mempengaruhi pemerintah daerah. Pola hubungan civil society dan pemerintah lokal juga menunjukkan kolaborasi antara NGO dengan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut salah satunya ditunjukkan melalui asistensi teknis yang dilakukan NGO dalam penyusunan Standar Layanan Informasi Publik. Kolaborasi tersebut dilakukan karena NGO dan pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama menyangkut isu keterbukaan. NGO berkepentingan dengan keterbukaan informasi karena terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan informasi anggaran dan isu korupsi. Dalam hal pendanaan kegiatan NGO bekerjasama dengan lembaga internasional. Saran dalam penelitian ini kedepan hendaknya kedepan civil society memanfaatkan anggaran internal dan masyarakat sebagai bentuk penegasan civil society sebagai organisasi mandiri, sukarela dan wakil dari kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** **NGO, Pemerintahan Daerah, Keterbukaan Informasi Publik**